



WILAYAH SEGREGASI ETNIK DI KOTA MEDAN

Sri Kunarsih* & Tampilen

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the area of ethnic segregation in the city of Medan. Ethnic segregation is a concentration area where ethnic groups live based on similar backgrounds. This paper uses descriptive qualitative research methods with a case study approach. Data collection through literature study methods, interviews, and participatory observations. In the city of Medan although many ethnicities mingle but in terms of the area of residence still tend to be compartmentalized in similar ethnic concentration areas. In the concept of a plural and plural city system such as Medan such ethnic living conditions are considered less conducive. It should be in the plural and plural urban layout of each ethnicity that exists mingled by not expressing the symbols and background of the ethnicity. Thus creating a truly plural and plural social system in a complex social system.

ARTICLE HISTORY

Submitted 03 January 2022
Revised 10 January 2022
Accepted 02 February 2022
Published 28 February 2022

KEYWORDS

Ethnic segregation; ethnicity; multiethnic city of Medan.

CITATION (APA 6th Edition)

Kunarsih, S., & Tampilen. (2022). Wilayah Segregasi Etnik di Kota Medan. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(1), 53-58.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

sri.kunar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5080>

PENDAHULUAN

Berawal dari aspirasi rakyat yang terakumulasi menuju perubahan di bidang sosial, politik, dan agama, Indonesia menghadapi banyak persoalan kerusakan dan konflik. Konflik yang marak ke permukaan di antaranya adalah konflik bernuansa agama dan etnik atau membawa simbol-simbol agama dan etnik. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan. Sebagian dari kasus tersebut dianggap hanya kumpulan fakta yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi sebenarnya kasus-kasus tersebut memiliki makna dan nilai lebih jauh sebagai sebuah gugatan dan pertanyaan tentang proses pembauran masyarakat kita. Ada pendapat umum yang beranggapan bahwa proses dan program pembauran dalam masyarakat kita selama ini bersifat semu dan tidak mengakar hingga ke level bawah. Karena itu mulai muncul pandangan-pandangan pesimistis tentang kondisi kemajemukan masyarakat kita yang secara teoretis dipandang sebagai sebuah kelayakan dan kebanggaan masyarakat kita yang perlu dipelihara.

Wulangsari menjelaskan bahwa dari perspektif sosiologis, segregasi adalah tidak adanya interaksi antar kelompok sosial (Wulangsari, 2014). Oleh karena itu, desegregasi harus dimulai dengan memulihkan interaksi antar kelompok sosial. Permukiman masyarakat yang dibangun atas dasar identitas kelompok yang homogen dan eksklusif tentu saja membawa dampak negatif. Secara sosiologis, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan permasalahan sosial yang dapat memicu konflik. Padahal diharapkan lingkungan sekitar warga harus dihuni oleh berbagai agama. Hal ini menghasilkan integrasi sosial dan peluang untuk saling melindungi dan memahami. Segregasi terkait erat dengan konsep-konsep seperti polarisasi, stratifikasi dan ketidaksetaraan (Gorard & Taylor, 2002). Menurut (Cambridge Dictionary, 2020), segregasi adalah kebijakan menjaga satu kelompok orang terpisah dari yang lain dan memperlakukan mereka secara berbeda, terutama karena ras, jenis kelamin, atau agama. Segregasi terjadi karena suatu kebijakan bukanlah realitas sosial. Segregasi agama terjadi sebagai bentuk fenomena sosial, dan muncul dari keputusan hukum baik eksplisit maupun implisit.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Ciri khas penelitian studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber data, suatu strategi yang juga meningkatkan kredibilitas data (Hasudungan, Sariyatun, Joebagio, & Sartika, 2020). Sumber data potensial dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: dokumentasi, catatan arsip, wawancara, artefak fisik, pengamatan langsung, dan observasi partisipan. Unik dibandingkan dengan pendekatan kualitatif lainnya, dalam penelitian studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan data survei kuantitatif, yang memfasilitasi pencapaian pemahaman holistik dari fenomena yang sedang dipelajari. Dalam studi kasus, data dari berbagai sumber ini kemudian digabungkan dalam proses analisis daripada ditangani secara individual. Setiap sumber data adalah satu bagian dari "teka-teki," dengan masing-masing bagian berkontribusi pada pemahaman peneliti tentang keseluruhan fenomena (Rahardjo, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi-partisipasi, kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif studi kasus (Creswell, 2018): Pertama, para peneliti menentukan terlebih dahulu apakah pendekatan studi kasus sudah tepat untuk mempelajari masalah risetnya. Kedua, para peneliti perlu mengidentifikasi kasus atau beberapa kasus mereka. Kasus ini apakah melibatkan satu individu, beberapa individu, sebuah program, suatu peristiwa, atau suatu aktivitas. Ketiga, pengumpulan data meluas mengambil beragam sumber informasi. Seperti, cara observasi-partisipasi, kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Keempat, tipe analisis data ini berupa analisis holistik atau analisis melekat. Kelima, tahapan penafsiran, peneliti melaporkan makna dari kasus tersebut, apakah kasus instrumental atau kasus intrinsik. Analisis dan interpretasi ini dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang terkait dengan masalah penelitian. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data adalah kegiatan merangkum kembali catatan lapangan dengan memilih pokok-pokok pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu wilayah segregasi etnik di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari awal sebenarnya telah banyak keraguan dari berbagai pihak tentang kemungkinan Indonesia mampu menyatukan banyak suku bangsa dan etnik dalam satu kesatuan yang harmonis. Meskipun kemajemukan tidak harus selalu diandaikan berada dalam suasana pertentangan dan konflik. Artinya fenomena konflik bukan merupakan sebuah keniscayaan dalam kemajemukan etnik. Segregasi yang terjadi berpotensi menjadi konflik di kemudian hari jika tidak adanya saling kepercayaan dan saling perjumpaan di antara masyarakat (Hasudungan, 2020).

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa potensi konflik hampir dihadapi oleh setiap negara bangsa (*nation-state*) yang majemuk semisal Suriname, Indonesia, dan banyak negara lain. Terlepas dari persoalan apakah konflik muncul karena faktor etnisitas *an sich* atau ada faktor lain. Fakta tersebut menguatkan bahwa persoalan latar belakang etnik berperan besar dalam kelangsungan hidup negara bangsa. Bahkan beberapa fakta secara meyakinkan menunjukkan banyak di antara negara bangsa tersebut terpecah disebabkan persoalan identitas etnik. Uni Soviet menjadi salah satu di antara banyak fakta yang ada (Ariwianto, 2017).

Pandangan tersebut diperkuat dengan beberapa hasil penelitian para ahli seperti M.G. Smith (dalam Handoyo, Astuti, Iswari, Alimi, & Mustofa, 2015) yang menyatakan bahwa pada masyarakat majemuk yang memiliki berbagai kelompok dan kebudayaan yang beragam sering berlangsung perpecahan dan pertentangan. J.S Furnivall berdasarkan penelitiannya di Indonesia dan Birma sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat majemuk meskipun mereka tergabung dalam satu masyarakat dan berada dalam satu sistem politik, tetapi kehidupan mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya interaksi

sosial antar kelompok terhitung minim dan relasi sosial yang terjadi cenderung terbatas pada sektor ekonomi saja.

Fenomena di atas semakin menarik untuk diteliti tatkala kebudayaan dunia semakin menyatu tanpa batas (*bounderless*) di saat bersamaan identitas diri semakin menguat ke permukaan (Pamungkas, 2017). Sebagaimana yang telah dilansir oleh Naisbitt dan Aburderne dalam *Megatrend* 2000-nya. Dunia semakin menyatu bersamaan itu pula terpecah-pecah. Akankah Indonesia juga dilanda “demam” konflik identitas tersebut masih menjadi pertanyaan hingga kini. Pertanyaan tersebut muncul seiring dengan munculnya beberapa indikasi ke arah itu. Timor Leste juga muncul karena persoalan identitas etnik yang begitu kuat. Dan banyak lagi konflik berlatar belakang etnik yang muncul. Meskipun banyak kalangan yang memberi penjelasan bahwa konflik tersebut bermuara dari persoalan-persoalan non etnik (Wahyudi, 2015). Semisal keadilan, persaingan mendapatkan sumber-sumber kehidupan, kecemburuan sosial, kesenjangan dan sebagainya (Sibarani, 2013).

Apapun alasannya, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat berkonflik dengan membawa identitas etnik. Dayak dengan Madura di Kalimantan, etnik Batak dengan Flores di Batam, dan sesama etnik di Provinsi Papua dan seterusnya (Mumtazinur, 2017). Meskipun telah banyak dilakukan penelitian dan upaya rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik, ternyata potensi tersebut masih hidup hingga kini. Satu yang menjadi sorotan yang menarik dalam kaitan etnisitas ini adalah Sumatera Utara. Khususnya Medan sebagai tempat pertemuan banyak etnik di provinsi yang dikenal paling majemuk. Masyarakat di Sumatera Utara secara umum adalah masyarakat yang majemuk, baik dari latar belakang etnik, suku bangsa, dan agama. Di satu sisi kemajemukan tersebut menjadikan dinamika masyarakat cukup tinggi, tetapi disisi lain memiliki potensi untuk berkonflik [terbuka dan tertutup]. Inilah salah satu risiko dari masyarakat majemuk (*plural society*), bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnik yang berada dalam satu sistem pemerintahan (Azzuhri, 2012).

Pada awalnya banyak kalangan yang percaya bahwa konflik sosial sulit – untuk mengatakan tidak – akan terjadi konflik (agama, etnik dan lainnya) di Indonesia. Karena mereka mengandaikan masyarakat selalu berada dalam keseimbangan dan memiliki integrasi sosial yang sempurna. Tetapi pandangan tersebut terbantahkan dengan fakta yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tahun 1999, secara umum masyarakat Indonesia dilanda konflik sosial (Cahyono, 2018). Mulai dari konflik yang bernuansa politik hingga etnik dan agama.

Dalam teori ilmu sosial, terutama bagi aliran struktural-fungsional, masyarakat digambarkan selalu berada dalam kondisi seimbang (ekuilibrium) karena ikatan norma dan nilai-nilai. Meskipun kubu ini mengakui bahwa tidak ada keseimbangan yang sempurna, setidaknya berputar dekat dengan titik keseimbangan itu. Pandangan tersebut ternyata berbeda dengan aliran konflik yang justru melihat bahwa integrasi dan keseimbangan terjadi karena adanya konstrein dan paksaan.

Archer (1996) berpendapat, secara teoretis integrasi sosial merupakan proses menyatunya berbagai kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing.. berbaur dan membentuk identitas baru atau hidup dalam kondisi bentukan baru. Pada titik inilah sebenarnya sebuah proses asimilasi mencapai titik sempurnanya. Berbeda dengan akomodasi (penyesuaian) yang titik beratnya adalah proses kerja sama dan toleransi dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing kelompok.

Persoalan etnisitas tersebut semakin signifikan ketika masing-masing etnik hidup berdampingan dalam satu ruang tata kota seperti Medan. Masing-masing etnik yang ada bertemu dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Burner, Antropolog Amerika (1983) melihat bahwa tidak ada budaya yang dominan di kota Medan, karena heterogennya budaya kota ini. Selanjutnya, ia mengatakan karena sifat heterogennya itu pula masing-masing etnik yang ada saling menguatkan identitas budayanya. Sehingga terciptalah salah satunya wilayah-wilayah segregatif

kelompok etnik. Wilayah segregatif ini kemungkinan menimbulkan ikatan-ikatan primordialisme dan kesukuan.

Sengaja atau tidak, simbol-simbol etnisitas tersebut masih merupakan bagian dari pola berpikir dan bertindak mereka. Interaksi ini bisa berdampak positif dan negatif. Jika tidak dengan kompetisi yang sehat, maka konflik yang akan muncul. Fenomena keseharian etnik di Medan, meskipun kelihatannya latar belakang etnik tidak menjadi persoalan lagi, tetapi stereotip (positif dan negatif) tentang etnik masih ditemui (Makikama, Koagow, & Waleleng, 2021).

Ada kelompok etnik yang diberi label superior, Batak (Karo dan Toba) misalnya. Etnik ini kerap diberi label sebagai kelompok etnik yang keras dan berani, sehingga kurang disenangi atau malah ditakuti oleh etnik tertentu, etnik Minang misalnya (Agung & Suciati, 2016). Sebaliknya ada stereotip negatif terhadap etnik lainnya, seperti orang Batak Mandailing itu kikir, pelit, sehingga ada ungkapan “*Manipol*” singkatan dari “*Mandailing Polit*”. Jawa kurang tahu adat dan serba permisif, etnik Minangkabau itu licik, orang Melayu itu pemalas dan susah diatur (Zulfikarni & Liusti, 2020), “*Aceh Pungo*” (bodoh) dan masih banyak lagi stereotip negatif etnik di Medan (Suryana, Rahmi, & Kasmi, 2021).

Lain lagi halnya dengan etnik Tionghoa yang dianggap sebagai non pribumi di Medan (Anggraeni, 2011). Mereka dicap sebagai etnik yang eksklusif, egois, tidak membaur dan kurang nasionalis. Kata orang kebanyakan, orang Tionghoa di Medan paling sombong dibanding kota-kota lain di mana etnik ini ditemui. Karena itu etnik ini kerap menjadi sasaran etnik lainnya jika muncul kerusuhan, seperti kerusuhan di Medan tahun 1998 (Alfirdaus, 2015). Selain etnik Tionghoa, sebenarnya masih ada etnik lain yang dianggap sebagai etnik pendatang “orang keling” atau etnik Tamil. Etnik ini digambarkan kotor, tidak berpendidikan, dan kurang diperhitungkan. Karena disektor perekonomian mereka tidak memiliki akses yang besar seperti etnik Tionghoa. Etnik Tionghoa memiliki akses dan peran yang besar bagi sector perekonomian masyarakat Medan (Surya, 2009).

Konsep stereotip dalam ilmu sosial merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan konsep prasangka (*prejudice*). Kornblum & Lee (1995) menyatakan bahwa stereotip merupakan citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Selanjutnya menurut Kamanto, stereotip mungkin ada benarnya namun tidak seluruhnya benar. Selain persoalan stereotip negatif etnik, tempat tinggal etnik di Medan juga masih kurang membaur. Terdapat penumpukan wilayah dan tempat tinggal etnik. Etnik Minangkabau misalnya terkonsentrasi di daerah Sukaramai, Etnik Batak Karo di daerah Padang Bulan dan Simalingkar, etnik Jawa di Sei Agul dan Helvetia, Melayu di Kota Matsum, etnik Tionghoa di daerah Sukaramai dan Jalan Asia. Etnik Tamil di “Kampung Keling”, etnik Batak Mandailing dan sebagainya.

Wilayah segregasi etnik ini selain bisa berdampak negatif dalam memunculkan konflik bernuansa etnik di Medan, juga menghambat interaksi dan integrasi antar etnik karena mereka hidup dalam wilayah-wilayah yang terpisah (Ansori et al., 2014). Sehingga interaksi antara etnik hanya terbatas pada sektor tertentu saja, perekonomian misalnya. Idealnya masing-masing etnik hidup harmonis dalam satu ruang tata kota yang majemuk dan kompleks. Identitas etnik mereka tetap terpelihara dalam bingkai integrasi.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa proses pembauran etnik benar-benar terjadi, bukan pembauran semua yang bersifat fisik tetapi secara sosial tidak terjadi. Masyarakat kita secara faktual berinteraksi tetapi interaksi mereka hanya sebatas kepentingan materi semata.

SIMPULAN

Sudah sepantasnya dirancang sebuah program dan strategi pembauran yang sebenarnya. Di antaranya dengan menata tata ruang etnik yang majemuk dan plural di kota Medan. Program pembauran tersebut tentunya tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak ada partisipasi dan kesadaran setiap

komponen masyarakat yang ada. Sebab sasaran dan aktor pembauran itu sendiri adalah masyarakat. Artinya bahwa proses pembauran tidak dipaksakan dan bersifat rekaan semata. Sebab pembauran yang bersifat paksaan tanpa kesadaran hanya akan menciptakan proses pembauran yang bersifat semu dan sementara saja. Jika demikian halnya, maka kita hanya mengulang kembali apa yang telah ada selama ini tanpa mendapatkan kemajuan sama sekali.

REFERENSI

- Agung, M. I., & Suciati, R. (2016). Perbedaan Ekspresi Emosi pada orang Batak, Jawa, Melayu dan Minangkabau. *Jurnal Psikologi*, 12(2), 99–108. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/article/download/3236/2036>
- Alfirdaus, L. K. (2015). Agama dan kekerasan anti-Cina pada masa transisi demokrasi Indonesia, 1997–2004. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(1), 20. <https://doi.org/10.20473/mkp.V28i12015.20-32>
- Anggraeni, D. (2011). Does multicultural Indonesia include its ethnic Chinese? *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 13(2), 256. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v13i2.23>
- Ansori, M. H., Sukandar, R., Peranto, S., Karib, F., Cholid, S., & Rasyid, I. (2014). *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. Jakarta: THE HABIBIE CENTER. Retrieved from www.habibiecenter.or.id
- Archer, M. (1996). SOCIAL INTEGRATION AND SYSTEM INTEGRATION: DEVELOPING THE DISTINCTION. *Sociology*, 30(4), 679–699. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/42855733>
- Ariwianto, E. (2017). Hubungan Perdagangan & Ekonomi Negara Blok Timur Pasca Keruntuhan Uni Soviet. *Journal of History Education and Historiography*, 1(2), 43–50. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jhi/article/view/11241>
- Azzuhri, M. (2012). Konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan agama. *Tarbiyah*, 10(9), 47–48. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/forumtarbiyah/article/view/370>
- Cahyono, H. (2018). The State and Society in Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan). *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 1(1), 151–160. <https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.10>
- Cambridge Dictionary. (2020). Segregation. Retrieved from Cambridge University Press website: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/segregation>
- Creswell, J. W. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorard, S., & Taylor, C. (2002). What is segregation? A comparison of measures in terms of “strong” and “weak” compositional invariance. *Sociology*, 36(4), 875–895. <https://doi.org/10.1177/003803850203600405>
- Handoyo, E., Astuti, T. M. P., Iswari, R., Alimi, M. Y., & Mustofa, M. S. (2015). *STUDI MASYARAKAT INDONESIA* (E. Handoyo, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasudungan, A. N. (2020). Panas pela of education : Desegregation of Muslim and Christian post-reconciliation at SMPN 4 Salahutu Liang and SMPN 9 Ambon. *Simulacra*, 3(2), 223–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/sml.v3i2.7854.g5051>
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, S., Joebagio, H., & Sartika, L. D. (2020). TRANSFORMASI KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG DARI RESOLUSI KONFLIK HINGGA PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI MALUKU. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>
- Kornblum, S., & Lee, J.-W. (1995). Stimulus-response compatibility with relevant and irrelevant stimulus dimensions that do and do not overlap with the response. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 21(4), 855–875. <https://doi.org/10.1037/0096-1523.21.4.855>
- Makikama, C., Koagow, F. V., & Waleleng, G. J. (2021). Stereotip Mahasiswa Etnik Minahasa Dalam Berkomunikasi Dengan Mahasiswa Etnik Sangihe dalam menentukan kelangsungan sebuah hubungan . Persepsi yang cenderung negatif dan. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(2), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/33467>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Edition* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mumtazinur. (2017). Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif Green Thought. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 16–28. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3255>
- Pamungkas, C. (2017). Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*,

- 9(2), 245. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.245-261>
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>
- Sibarani, B. (2013). Bahasa, Etnisitas dan Potensinya terhadap Konflik Etnis. *Jurnal Bahas Unimed*, 85(39), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.voi85%20TH%2039.2426>
- Surya, A. (2009). SUMBANGSIH ETNIK TIONGHOA DALAM BISNIS DI KOTA MEDAN. *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)*, 13(24), 1–15. Retrieved from <https://jip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIP/article/view/5756>
- Suryana, I., Rahmi, R., & Kasmi, H. (2021). KAJIAN SOSIAL DALAM BUKU ACEH PUNGO KARYA TAUFIK AL MUBARAK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) STKIP Bina Bangsa Getsempena*, 2(1), 1–14. Retrieved from <https://jim.bbg.ac.id/pendidikan/article/view/316>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15. Retrieved from <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45>
- Wulangsari, A. (2014). Segregasi permukiman berdasarkan faktor dan pola permukiman di Solo Baru, Sukoharjo. *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA*, 10(4), 387. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i4.8166>
- Zulfikarni, Z., & Liusti, S. A. (2020). MERAWAT INGATAN: FILOSOFI MARANTAU DI DALAM PANTUN MINANGKABAU. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54565>